

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	24
KERANGKA TEORETIS	24
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Keputusan Tata Usaha Negara.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pemerintah.....	32
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	48
BAB III.....	55
DATA HASIL PENELITIAN	55
A. Profil Penggugat.....	55
B. Profil Tergugat.....	57
C. Uraian Kasus Posisi.....	57
D. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	61
E. Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	63
Tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UU ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Manajemen PNS). Dalam rangka melaksanakan PP	

Manajemen PNS tersebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan BKN Nomor: 3 Tahun 2020 Tertanggal 8 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.....	65
BAB IV.....	71
ANALISIS PERMASALAHAN.....	71
A. Analisis mengenai Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	71
B. Analisis mengenai Kesesuaian Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 41/G/2019/PTUN.ABN. dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.....	82
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	1